

Strategi politik partai PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD kota Medan tahun 2024-2029

Nurul Azmy Pratiwi¹, Prayetno²
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan , Indonesia
nurulazmy185@gmail.com¹, prayetno@unimed.ac.id²

Informasi artikel	ABSTRAK
Diterima: 22-07-2025 Disetujui: 31-11-2025 Kata kunci: <i>Keterwakilan Perempuan, Strategi Politik, Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Kota Medan, Pemilu 2024-2029.</i>	Partisipasi politik perempuan memperkuat demokrasi dengan memastikan representasi mereka dalam pengambilan keputusan, sehingga mencapai kesetaraan dalam struktur politik. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia masih belum mencapai angka minimal 30% a firmative action. Penelitian ini mengeksplorasi strategi politik PKS untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan pada pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan di kantor DPD PKS kota medan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, observasi, serta referensi dari buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS menggunakan pelatihan Latansa dan program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) untuk mendidik dan memberdayakan perempuan. Kampanye dilakukan melalui komunikasi langsung, diskusi publik, dan media massa. PKS menyiapkan kader tanpa dukungan finansial, mengandalkan tanggung jawab pribadi calon. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan mobilitas dan tanggung jawab domestik, PKS berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di daerah pemilihan. Pada pemilu 2024-2029, dari 16 calon perempuan, hanya satu yang terpilih, dan dari 8 kursi DPRD yang dimenangkan, hanya 12,5% diisi oleh perempuan, menunjukkan belum tercapainya kuota maksimal 30% keterwakilan perempuan.
Keywords: <i>Women's Representation, Political Strategies, Prosperous Justice Party (PKS), Medan City Regional House of Representatives (DPRD), 2024-2029 Elections.</i>	ABSTRACT Women's political participation strengthens democracy by ensuring their representation in decision-making, thereby achieving equality in the political structure. Women's representation in Indonesian legislative institutions still has not reached the minimum figure of 30% affirmative action. This research explores PKS's political strategy to increase women's representation in the Medan City DPRD in the 2024 elections. This research was conducted at the Medan City PKS DPD office using qualitative descriptive methods with interviews, documentation, observations, as well as references from books, journals and articles. The research results show that PKS uses Latansa training and the Indonesian Family Home (RKI) program to educate and empower women. The campaign is carried out through direct communication, public discussions and mass media. PKS prepares cadres without financial support, relying on the personal responsibility of candidates. Despite challenges such as limited mobility and domestic responsibilities, PKS succeeded in meeting the 30% quota for women's representation in electoral districts. In the 2024-2029 elections, of the 16 female candidates, only one was elected, and of the 8 DPRD seats won, only 12.5% were filled by women, indicating that the maximum quota of 30% female representation has not been achieved.

Copyright © 2025 (Nurul Azmy Pratiwi & Prayetno). All Right Reserved

Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi di mana penting bagi warganya untuk memilih pejabat melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu berperan dalam menentukan arah kebijakan publik negara. Kesetaraan gender dalam politik sangat penting untuk mencapai demokrasi perwakilan yang seimbang, dengan memastikan keterwakilan perempuan di parlemen. Hak politik perempuan dijamin oleh berbagai instrumen hukum yang memastikan hak-hak tersebut (HERWIN P NAPITUPULU, 2023).

Meskipun jumlah perempuan meningkat pada setiap periode, tujuan yang diharapkan belum tercapai. Selain itu, keterwakilan perempuan di tingkat daerah dapat menghambat pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. (Loisa De Marilak Gendi Kedu, 2023).

Karena kenyataannya, masih terdapat ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan, terutama dalam peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berorientasi gender, sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, sangat penting dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam bidang politik. (Gusmansyah, 2019).

Data menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota dari 12% pada tahun 2009 menjadi 15,13% pada tahun 2019 berkat kebijakan kuota 30%. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam mencapai kuota ini, seperti yang terlihat di DPRD Kota Medan. Meskipun persyaratan pencalonan perempuan terpenuhi, jumlah perempuan terpilih masih jauh dari yang diharapkan.

Keterwakilan perempuan di DPRD adalah isu penting dalam kesetaraan gender dan demokrasi. Dukungan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga negara diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan yang berperspektif gender. Meskipun perempuan sering diabaikan dalam peran publik, pendidikan politik penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di masa depan.

Partai politik (parpol) memiliki posisi sentral dan strategis dalam sistem demokrasi. Secara teoritis, sentralitas partai politik dimungkinkan karena mereka mampu mengubah aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik, yang merupakan produk parlemen atau keputusan bersama antara parlemen sebagai badan legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif. Oleh karena itu, partai politik sering dianggap sebagai salah satu lembaga dan pilar demokrasi. Mereka tidak hanya berada dalam sistem demokrasi perwakilan tetapi juga harus menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah. (Syamsuddin Haris, 2020).

Peter Schroder mengungkapkan bahwa strategi politik adalah upaya untuk mencapai tujuan politik, yang pada umumnya berarti memperoleh kekuasaan. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang tidak mungkin terwujud. Salah satu contoh strategi politik adalah strategi kampanye, yang bertujuan untuk meraih hasil yang lebih baik dalam pemilihan umum dengan harapan dapat mendorong kebijakan yang mendukung perubahan sosial. (Schröder, 2010)

Peter Schroder menyatakan bahwa strategi politik digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks memperoleh kekuasaan. Menurutnya, terdapat dua pola dasar strategi politik, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif.

1. Strategi Ofensif: Meliputi strategi memperluas pasar (strategi persaingan) dan strategi menembus pasar (strategi pelanggan).
2. Strategi Defensif: Meliputi strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator) dan strategi menutup atau menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar).

Dalam buku yang berjudul "The Politics Of Presence" (1995), Anne Phillips menguraikan teori politik kehadiran yang menyatakan bahwa politisi perempuan memiliki keunggulan dalam mewakili kepentingan kaumnya. Teori ini menyiratkan bahwa representasi deskriptif dan substansif saling terkait erat. Dengan kata lain, peningkatan jumlah perempuan di parlemen akan

berdampak pada peningkatan representasi kepentingan perempuan di dalamnya.

Phillips mengaitkan pandangannya dengan perbedaan gender dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola pengasuhan anak, pendidikan, pekerjaan, jenis pekerjaan, serta eksposur terhadap kekerasan dan kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan. Meskipun demikian, Phillips mengakui ketidakpastian mengenai apakah peningkatan jumlah perempuan di parlemen akan mengubah agenda politik untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan, yang ia sebut sebagai "shot in the dark." Phillips juga mengkritik rendahnya keterwakilan kelompok terpinggirkan, seperti perempuan, di parlemen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor struktural seperti sistem pemilu dan dominasi laki-laki, serta faktor budaya seperti stereotip negatif tentang kemampuan dan kelayakan perempuan dalam politik. Ketidaksetaraan di parlemen tidak hanya merugikan perempuan dan kelompok terpinggirkan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Lara (2022) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu dari berbagai partai politik di Indonesia. PKS merupakan partai dengan ideologi Islam yang saat ini memiliki perwakilan di parlemen Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu partai politik di Indonesia, memainkan peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Pada pemilu 2019, PKS mengajukan 7 wakil di DPRD Kota Medan, dengan persentase perempuan mencapai 30% di setiap daerah pemilihan. Namun, hanya satu perempuan dari PKS yang berhasil terpilih.

Studi ini akan meneliti strategi dan kebijakan PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan untuk mencapai kuota 30% pada pemilu 2024. Dengan adanya pemilu serentak pada 2024, termasuk di Kota Medan, partisipasi politik perempuan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan demokrasi.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam tentang objek penelitian dalam periode tertentu. (Syah, 2010). Pemilihan metode penelitian deskriptif kualitatif sangat sesuai untuk konteks penelitian ini, karena peneliti akan menyelidiki strategi politik Partai PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan untuk periode 2024-2029.

Penelitian ini melibatkan 5 informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan mereka yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memudahkan dalam mengkaji objek penelitian. Informan penelitian ini adalah pengurus dari DPD PKS Kota Medan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep dan teori yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Hasil dan pembahasan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme demokratis untuk memperoleh pemerintahan yang sah. Melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat dapat mengganti pemerintahan secara damai tanpa melanggar aturan yang telah disepakati. Bagi bangsa Indonesia, pemilu merupakan alat penting untuk membentuk demokrasi yang baik, karena diyakini dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Partai politik adalah organisasi nasional yang terdiri dari sekelompok warga negara Indonesia dengan tujuan bersama. Partai politik dianggap penting dalam negara demokrasi karena merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Salah satu partai politik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara, adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini memiliki strategi untuk memenangkan pemilu legislatif Kota Medan tahun 2024-2029 dan meningkatkan keterwakilan perempuan.

Partai PKS berfungsi sebagai wadah untuk membentuk kader bangsa yang siap berubah menuju kebaikan, berkorban, dan mandiri, serta memahami ajaran Islam sesuai anjuran Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Kota Medan tahun 2024-2029, PKS, sebagai partai Islam, menekankan pentingnya Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah

Wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan) bagi semua kadernya, baik perempuan maupun laki-laki, untuk menciptakan Masyarakat Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan pelatihan perempuan siaga (Latansa). Latansa, yang berasal dari bahasa Arab dan berarti 'jangan lupa', dimaksudkan untuk mengingatkan perempuan agar tidak melupakan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pelatihan ini, PKS berharap perempuan dapat lebih terdidik dalam berbagai aspek dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Selain itu, PKS juga memiliki program khusus untuk perempuan yang disebut Rumah Keluarga Indonesia (RKI), yang menyediakan sekolah untuk perempuan, ibu, dan pra-nikah, serta program lainnya yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas perempuan.

Sebelum memasuki masa kampanye, Partai PKS memberikan pembekalan kepada seluruh calon legislatif, baik perempuan maupun laki-laki, yang telah terdaftar sebagai calon tetap. Dalam pembekalan ini, disampaikan beberapa strategi tambahan untuk memenangkan pemilu, seperti pemetaan wilayah dan demografi daerah pemilihan, termasuk jumlah pemilih tetap laki-laki dan perempuan serta jumlah TPS. Calon legislatif juga diajarkan metode promosi seperti kampanye door to door, mengadakan pengajian, atau menghadiri pengajian yang diadakan di masyarakat. PKS memiliki Unit Pembinaan Anggota (UPA) yang memberikan arahan terkait kebangsaan, kemasyarakatan, dan pemahaman keagamaan yang inklusif serta moderat. Dengan demikian, PKS menyebarkan ilmu yang diperoleh melalui pengajian di masyarakat.

Sebagai partai Islam, PKS menerapkan berbagai pendekatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, salah satunya dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari berbagai latar belakang, seperti agama, suku, budaya, dan daerah. DPD PKS Kota Medan menggunakan teknik kampanye yang berfokus pada tiga strategi komunikasi: pertama, komunikasi langsung antara kader PKS dan masyarakat, seperti kampanye door-to-door; kedua, membuka diskusi publik oleh calon legislatif di tempat umum; dan ketiga, memanfaatkan media massa untuk mempengaruhi opini publik.

Partai PKS mempersiapkan kader untuk berkompetisi dalam pemilihan legislatif dengan dukungan partai, bukan dukungan finansial,

karena pendanaan merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing calon legislatif. Meskipun demikian, PKS tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Walaupun menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan mobilitas, fleksibilitas waktu kampanye, dan tanggung jawab domestik sebagai ibu rumah tangga, yang memengaruhi peran serta dan efektivitas mereka dalam politik, para caleg perempuan tetap dapat memaksimalkan waktu mereka untuk memenuhi tugas kepartaian.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa setiap partai politik harus memiliki minimal 30% perempuan dalam setiap struktur dan pengelolaan di tingkat pusat. Selain itu, UU No. 10 Tahun 2008 menetapkan bahwa partai politik baru hanya diperbolehkan berpartisipasi setelah memenuhi persyaratan tersebut dalam pengelolaan partai politik di tingkat pusat.

Pada pemilu legislatif Kota Medan 2024-2029, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 985/2024 mengenai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu 2024 untuk anggota DPRD Medan, PDIP memperoleh 9 kursi dengan 204.228 suara, PKS meraih 8 kursi dengan 186.789 suara, Gerindra dan Golkar masing-masing mendapatkan 6 kursi dengan 164.371 suara dan 138.529 suara. NasDem memperoleh 5 kursi dengan 109.393 suara, PSI dan Demokrat masing-masing meraih 4 kursi dengan 61.644 suara dan 59.756 suara. PAN mendapatkan 3 kursi dengan 85.000 suara, sementara PKB dan Hanura memperoleh masing-masing 2 kursi dengan 44.827 suara dan 30.499 suara. Perindo mendapatkan 1 kursi dengan 25.690 suara.

Dari 50 calon legislatif terpilih DPRD Medan hasil Pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU, sebanyak 8 di antaranya adalah perempuan. Mereka memperoleh suara terbanyak di partai masing-masing. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2019, yang hanya memiliki 5 anggota dewan perempuan.

Pada pemilu legislatif Kota Medan 2024-2029, Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan 16 calon legislatif perempuan di 5 daerah pemilihan, namun hanya 1 yang berhasil terpilih, sehingga persentasenya adalah 6,2% (1 dari 16). Secara keseluruhan, dari 8 kursi yang diraih PKS di DPRD, hanya 12,5% diisi oleh perempuan. Meskipun kuota 30% perempuan diwajibkan hanya saat pendaftaran, persentase ini menunjukkan bahwa PKS belum mencapai kuota

maksimal 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan untuk periode 2024-2029.

Dalam penelitian ini, strategi PKS dianggap cukup baik meskipun jumlah keterwakilan perempuan dari partai tersebut tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut seorang informan, keberhasilan strategi partai politik tidak hanya diukur dari jumlah kursi yang diperoleh, tetapi juga dari indikator lain seperti pertumbuhan, adaptasi, dan penguatan partai. Informan tersebut menilai bahwa PKS telah meningkatkan kapasitas internal melalui pengembangan kader, pelatihan, dan peningkatan kemampuan manajemen. Meskipun belum menambah jumlah kursi, investasi dalam penguatan internal ini membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan di masa depan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian di kantor DPD PKS Kota Medan, strategi PKS untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD 2024-2029 melibatkan pelatihan perempuan siaga (Latansa), yang bertujuan untuk mengingatkan perempuan akan peran penting mereka dalam masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat mendidik perempuan agar dapat memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Selain itu, PKS juga memiliki program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang menyediakan pendidikan bagi perempuan, ibu, dan calon pengantin, serta berbagai program lainnya untuk pemberdayaan perempuan.

Partai PKS Kota Medan menggunakan tiga strategi komunikasi dalam kampanye: komunikasi langsung dari pintu ke pintu, diskusi publik dengan masyarakat, dan pemanfaatan media massa. PKS mendukung kadernya tanpa bantuan finansial, karena pendanaan merupakan tanggung jawab pribadi. Walaupun menghadapi tantangan seperti keterbatasan mobilitas dan tanggung jawab domestik, PKS dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Pada pemilu 2024-2029, PKS mencalonkan 16 perempuan di 5 daerah pemilihan, namun hanya 1 yang terpilih, dan dari 8 kursi DPRD yang dimenangkan, hanya 12,5% diisi oleh perempuan. Meskipun jumlah keterwakilan perempuan tidak meningkat, strategi PKS dianggap cukup baik berkat peningkatan kapasitas internal melalui pengembangan kader dan manajemen yang lebih baik, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan.

Referensi

- Al-Jauhari, A. (2021). Buku Materi Pembelajaran Uv-Vis. *Dialog*, 44(2), i-Vi.
- Anne phillips. (1995). (*Oxford political theory*) *Anne Phillips - The politics of presence-Clarendon Press_ Oxford University Press* (1995).
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Hawa*, 1(1).
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- HERWIN P NAPITUPULU. (2023). *KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA. 1.*
- Hardani, S.Pd.,M.Si., dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In LP2M UST Jogja (Issue maret).
- KPU. (2013). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum, 2008.
- L, J. M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret).
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Lara. (2022). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu dari sekian banyaknya partai politik di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai berbasis islam yang saat ini memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2. www.aging-us.com
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*.
<http://cakrawikara.id>
- Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 14–22.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712>

- Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47–66.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Rahayu, S., Nasution, A., & Saleh, A. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterpilihan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu 2019. *Perspektif*, 10(2), 424–440.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4603>
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In Penerbit Alfabeta.
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia.
- Syah, H. (2010). Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif. *Pekanbaru: Suska Pres*.
- Syamsuddin Haris. (2020). *Menuju reformasi partai politik*. PT Gramedia pustaka utama.
- Sekretariat Negara. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. 1–283.